

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa bila didirikan atas dasar persatuan dan kesatuan akan memiliki kedaulatan yang utuh. Persatuan dan kesatuan sudah menjadi tujuan untuk menyatukan perbedaan cara pandang tiap individu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pada alinea keempat menjelaskan bahwa tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Intinya tujuan Bangsa Indonesia yaitu sebagai perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan dan perdamaian.

Secara hukum bagi warga negara bela negara merupakan hak dan kewajiban seperti yang tertulis dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat 3 : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, serta pada Pasal 30 Ayat 1 : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut sejalan dengan UU RI Nomor 39 Pasal 68 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) tertulis setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Begitu pula dalam UUD NRI 1945 Nomor 20 Pasal 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maksudnya pendidikan nasional membentuk peradaban bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Aktualisasi bela negara merupakan hal penting bagi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, menyadari akan kebhinekaan, sikap mencintai, rela berkorban dan sadar akan berbangsa dan bernegara, merupakan suatu cita-cita etis luhur yang dimiliki bersama.

Pertahanan nasional merupakan suatu usaha untuk menyurutkan semua hal yang mengancam persatuan dari luar maupun dalam negeri, dalam motif apa pun, yang berpotensi memecah kedaulatan, keamanan, keselamatan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Pertahanan negara ini butuh adanya kesadaran bela negara bagi seluruh golongan masyarakat khususnya generasi muda saat ini.

Bela negara merupakan perilaku atau tindakan masyarakat yang didasari oleh rasa cinta kepada tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang muncul dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang dapat membahayakan keutuhan wilayah dan nilai-nilai luhur Pancasila. (Soepandji & Farid, 2018). Sebagai jembatan menuju masyarakat madani, pendidikan bela negara merupakan langkah dalam pengembangan karakter. Setiap individu khususnya generasi muda harus berjuang dalam bentuk tindakan nyata untuk meningkatkan kompetensi diri agar mampu menjaga keutuhan NKRI (Khotimah, 2017). Salah satu wujud daripada sikap

generasi muda sebagai bentuk bela negara seperti memiliki jiwa dan rasa nasionalisme yang tinggi sehingga dapat meminimalisir pengaruh sosial budaya luar yang menyebabkan lunturnya karakter bangsa Indonesia (Taqo Sidqi, 2018). Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki program seperti Indonesia yaitu bela negara, disana disebut dengan *National Service* (NS). Program ini wajib untuk laki-laki warga negara Singapura yang berusia 18 tahun atau memiliki status penduduk tetap, generasi kedua (berstatus tetap dari orang tua). Sejak memasuki usia 16 tahun 6 bulan mereka wajib mendaftar keikutsertaan program NS (Soepandji & Farid, 2018).

Era globalisasi saat ini memberikan ruang yang lebih mudah bagi generasi muda dalam mengenal dan memahami kebudayaan luar sehingga mendatangkan transformasi signifikan terhadap sikap maupun tindakan generasi muda dalam negeri (Umra, 2019). Media sosial kerap diposisikan sebagai ‘terdakwa’, sumber atau pemicu dari segala persoalan yang mengancam pada kebhinekaan. Rasa cinta dan bangga terhadap bangsa sendiri menjadi luntur sehingga jiwa nasionalisme makin lama semakin surut. Menurut Subagyo dalam Nurdiyana & Prastini, (2020) bela negara di era globalisasi saat ini merupakan sebuah topik yang menjadi pusat perhatian untuk didiskusikan. Era globalisasi mengancam adanya nasionalisme dan pembentukan bangsa negara maka perlu menekankan kepada warga negara pentingnya bela negara. Berbagai informasi yang tersebar luas dapat mengakibatkan perubahan ideologi dan perilaku manusia. Hal tersebut dapat mempengaruhi peralihan pada perspektif kehidupan yang lain, seperti hubungan tiap individu, kegiatan sosial masyarakat hingga berpengaruh pada sistem

kebudayaan bangsa. Dalam berbagai kehidupan globalisasi mempengaruhi beberapa aspek, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Pada bidang politik pengaruh globalisasi yaitu masuknya ideologi lain dan menyebarnya gagasan dan nilai-nilai demokratis yang mencakup masalah HAM. Pengaruh globalisasi terhadap perekonomian adalah memperkuat kapitalisme dan pasar bebas. Peristiwa tersebut sesuai dengan meningkatnya jumlah perusahaan internasional, persaingan yang semakin ketat dan perdagangan yang luas. Pada aspek sosial budaya yaitu membaurnya nilai-nilai kebudayaan luar. Maka berdampak pada merosotnya nilai sosial budaya suatu bangsa yang mulanya sudah menjadi identitas diri. Kemudahan masuknya nilai kebudayaan luar didukung oleh kemajuan teknik informatika saat ini. Adanya nilai budaya luar yang masuk dapat menimbulkan dampak pada tindakan dan moral masyarakat hingga mengguncangkan pertahanan dan keamanan negara. Misalnya adanya ancaman terorisme, pencemaran udara, kebakaran hutan, *illegal fishing*, *illegal logging*, dsb (Subagyo, 2018).

Bela negara merupakan tonggak peradaban patriotisme bagi warga negara muda (Hidayahl dkk., 2020). Generasi muda dapat dikatakan sebagai aset negara dalam membangun bangsa (modal pembangunan). Hasil SP (Sensus Penduduk) pada tahun 2020 tercatat bahwa generasi Z dan generasi milenial mendominasi sebagian besar jumlah penduduk Indonesia. Bila dibandingkan dengan total seluruh populasi Indonesia jumlah generasi Z sebesar 27,94 persen dan generasi milenial sebesar 25,87 persen (BPS, 2021). Dominasi penduduk ini menjadi latar

belakang mengapa generasi muda menjadi salah satu kekuatan dalam negeri sendiri.

Gambar 1.1 Komposisi penduduk menurut generasi tahun 2020



Sumber : bps.go.id (2021)

Kesigapan generasi muda dalam menekuni nilai-nilai bela negara dapat dikatakan sebagai bentuk pengaktualisasian bentuk kesadaran bela negara (Mufarriq, 2021). Sebagai generasi penerus bangsa, para pemuda harus memiliki sikap yang acuh, kewaspadaan, dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dini

atau menangkal berbagai isu yang hendak membubarkan persatuan. Masyarakat perlu andil dalam berbagai kegiatan sebagai bentuk implementasi pemahaman bela negara yang bersifat kecintaan pada negara, berpedoman pada Pancasila, dan kegiatan positif lainnya yang sesuai keahlian masing-masing baik di lingkungan pemerintah dan masyarakat.

Mahasiswa sebagai salah satu unsur dari warga negara merupakan komunitas unik yang memiliki kesempatan, kelebihan serta semangat membara. Mereka sebagai golongan intelektual pemuda berperan penting dalam pertumbuhan serta kemajuan negara. Mata kuliah yang telah diberikan selama di perguruan tinggi dapat berguna dalam negeri maupun internasional. Dengan demikian diharapkan akan lahir generasi muda sebagai pemimpin bangsa yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Pemimpin yang dimaksud ialah memiliki intelektualitas, memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai dan norma kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan sosial, sehingga menumbuhkan persatuan bangsa yang kuat.

Surabaya merupakan kota yang jumlah mahasiswanya terbanyak se-Jawa Timur. Menurut hasil dari data BPS Provinsi Jawa Timur jumlah mahasiswa (negeri dan swasta) Kota Surabaya di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 dan 2020 mencapai 534.850 mahasiswa.

Tabel 1.1 Jumlah Mahasiswa Provinsi Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah mahasiswa	
		2019	2020
1.	Pacitan	1.121	1.078
2.	Ponorogo	12209	12707

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah mahasiswa	
		2019	2020
3.	Trenggalek	614	674
4.	Tulungagung	3835	3792
5.	Blitar	-	-
6.	Kediri	4666	4136
7.	Malang	4594	6452
8.	Lumajang	3590	4186
9.	Jember	64891	68247
10.	Banyuwangi	10756	17367
11.	Bondowoso	598	730
12.	Situbondo	9238	9750
13.	Probolinggo	11587	10433
14.	Pasuruan	5425	5837
15.	Sidoarjo	17011	19694
16.	Mojokerto	7435	6976
17.	Jombang	14713	17301
18.	Nganjuk	1706	1681
19.	Madiun	-	-
20.	Magetan	635	489
21.	Ngawi	1532	1444
22.	Bojonegoro	5672	6986
23.	Tuban	5286	5265
24.	Lamongan	13530	10969
25.	Gresik	13415	11285
26.	Bangkalan	17604	18937
27.	Sampang	1082	1229
28.	Pamekasan	7575	6353
29.	Sumenep	5288	5491
30.	Kediri	25992	26986

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah mahasiswa	
		2019	2020
31.	Blitar	5797	5091
32.	Malang	244890	251902
33.	Probolinggo	437	435
34.	Pasuruan	2739	1500
35.	Mojokerto	2488	2599
36.	Madiun	13951	12439
37.	Surabaya	141252	257630
38.	Batu	-	31
Total		819122	818111

Sumber : jatim.bps.go.id (2021)

Menurut Cahyono (2019) mahasiswa merupakan sekelompok bagian yang khusus dalam lingkungan masyarakat tanpa melepaskan dirinya dari masyarakat. Mahasiswa memiliki 4 peran penting dalam lingkungan masyarakat yaitu sebagai pelaku perubahan, kontrol sosial, tangguh, dan bermoral untuk berkontribusi dalam bela negara serta penentu arah perjuangan. Mahasiswa sebagai pelaku utama yang wajib menanamkan nilai bela negara, karena potensi akan ancaman terhadap NKRI yang semakin tinggi, yakni disintegrasi bangsa, keresahan sosial karena ketimpangan ekonomi dan pelanggaran HAM, upaya penggantian Pancasila, dan potensi konflik antar kelompok atau golongan (Muawanah, 2019).

Kekuatan nasionalisme Papua berkembang sebagai usaha untuk melepaskan dirinya dari kolonialisme Indonesia. Sebagai unsur bangsa masyarakat hendaknya obyektif dalam memandang nasionalisme bukan secara

subyektif. Hal ini dapat dipahami sebagai sesuatu yang mutlak akibatnya nasionalisme yang baru dinilai menyimpang.

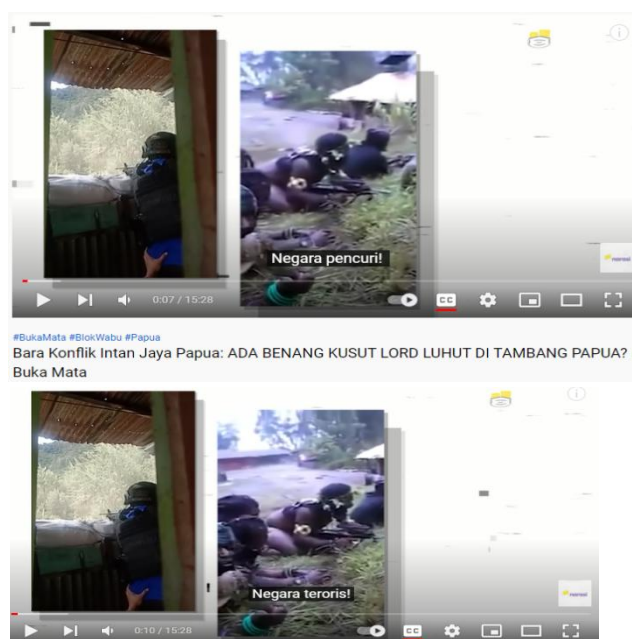
Papua atau yang dulunya disebut Irian Barat, dinilai bermasalah oleh penduduk Papua dan penduduk lainnya saat masuk ke Indonesia, khususnya yang menjadi dalil saat pengambilan suara yang dilaksanakan pada Juli-Agustus 1969 (Hutubessy & Engel, 2019). Pada tahun 1949 Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan sebagai awal dari sejarah peristiwa itu. Lalu pada 15 Agustus 1962 berlangsung Perjanjian *New York (New York Agreement)* yang merupakan kelanjutan dari KMB. Perjanjian ini ditindak lanjuti dengan *Act Of Free Choice* atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, namun Pepera terlaksana tidak sesuai dengan sistem *One Man One Vote* (satu orang satu suara) tetapi melalui sistem perwakilan yang melibatkan 1025 tokoh masyarakat Papua.

Sepanjang sejarah nasionalisme tumbuh dan melekat di benak masyarakat Papua. Terutama jika adanya kesenjangan sosial di Papua, menarik kembali pikiran pada apa kesalahan yang telah dilakukan Indonesia terhadap masyarakat Papua dengan dalih pembangunan. Gerakan pro demokrasi mulai bermunculan pada 28 Juli 1965 yang dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Berangkat dari organisasi tersebut nasionalisme Papua terlembaga dan mempunyai gerakan politik (Dika, 2020). Banyak rakyat yang terkena imbas oleh militer Indonesia dengan alasan membasmi GPK/OPM. Kasus Manokwari tahun 1965, Wamena (Jayawijaya) tahun 1977, Biak berdarah tahun 1980-an dan 1998, Sarmi (Jayapura) tahun 1992, Timika tahun 1995. Dengan berbagai peristiwa tersebut

banyak anak yang kehilangan orangtuanya karena menjadi korban penindasan dan tidak diselesaikan sesuai dengan hukum.

Dalam youtube Narasi TV terdapat video konflik bersenjata yang tak kunjung reda mulai tiga tahun terakhir antara Tentara Nasional Indonesia (TNI-POLRI) dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB), di pegunungan tengah Papua tak kunjung reda tiga tahun terakhir. Diduga korban langsung adalah masyarakat sipil. Mereka kerap dituduh bagian kelompok kriminal bersenjata oleh TNI/ Polri, dan dituding mata-mata oleh TPNPB. Dari situlah kekerasan terhadap masyarakat sipil bermunculan.

Gambar 1.2 Konflik Bersenjata TNPB dan TNI-POLRI



Sumber : Youtube Narasi Newsroom (2021)

Didalam video sangat terlihat bahwa orang-orang Papua itu meneriaki negara Indonesia ialah bagian dari teroris. Hal ini justru menjadi permasalahan dalam negeri. Tak heran jika korban mayoritas dari masyarakat sipil. Sedangkan,

pelanggaran hak asasi manusia di Papua umumnya dipicu oleh kehadiran berbagai proyek sumber daya alam yang membuahkan konflik ekonomi, sosial, dan budaya.

Kasus lainnya terjadi di tanah air pada awal tahun 2021 terhadap orang papua. Masyarakat melaporkan kepada Polri bahwa Natalius Pigai, mantan komisioner Komnas HAM telah menjadi korban rasisme oleh Ambroncius Nababan, politikus partai Hanura. Tindakan tersebut berupa sindiran di media sosial yaitu berupa foto Natalius yang dipasangkan dengan foto gorilla beserta komentar menyangkut pautkan vaksin yang berbunyi : “Edodoeeee pace. Vaksin ko bukan sinovac pace tapi ko pu sodara bilang vaksin rabies". persoalan ini telah ditangani oleh pihak berwajib demi menegakkan keadilan.

Kekerasan di wilayah Papua hingga saat ini terus terjadi tiap tahunnya, semula OPM sebagai organisasi biasa kini berubah menjadi gerakan separatis yang penuh kekerasan dalam mencapai tujuannya. Gerakan tersebut menjadi salah satu ancaman serius bagi keutuhan wilayah Indonesia (Mulia dkk., 2020). Bagi orang Papua, musuh sebenarnya bukan persoalan suku, melainkan suatu modus yang menyerap menghilangkan keberadaan masyarakat Papua. Melihat persoalan tersebut anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dari Jogja terdorong untuk memberontak oknum pemerintah, serta mengumpulkan massa yang lebih banyak atas bentuk usaha menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa sesungguhnya lawan bagi masyarakat Papua tidak dari individu, etnis atau berbagai suku lainnya di Indonesia. Bergabungnya komunitas tersebut menghasilkan martabat kebersamaan dalam suatu bilik publik untuk memperjuangkan hak mereka sampai

mencapai tujuan. Pandangan ini sesuai dengan aktivis Ernawati dari gerakan pro-demokrasi:

“Papua ini persoalan internasional. Orang Papua yang merasa ditindas ingin merdeka. Tapi kalau Papua merdeka, ada yang senang karena bisa lebih mudah menjarah sumber daya alam Papua”. (Aliansi Mahasiswa Papua, Gerakan yang Kian Garang (cnnindonesia.com), diakses pada September 2021)

Gambar 1.3 Aliansi Mahasiswa Papua menggelar aksi



Sumber : CNN Indonesia (2019)

Saat ini tindakan generasi muda dalam peristiwa pelanggaran hukum telah menunjukkan bahwa bela negara belum terbentuk dalam kehidupan nasional. Rasa nasionalisme generasi muda kini dinilai rendah mereka tidak berdaya dalam tugas melindungi negara Indonesia dan bersikap yang bertentangan dengan nilai bela negara serta terganggunya kelangsungan hidup bernegara.

Pada tanggal 16 Agustus 2019 terjadi insiden pengepungan di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya yang berujung pada demonstrasi berbagai tempat. Asrama tersebut merupakan tanggung jawab oleh Pemerintah Papua sendiri. Awal mula pengepungan Asrama Mahasiswa tersebut dilatarbelakangi oleh rusaknya bendera merah putih yang berada di depan asrama. Warga setempat dan pihak aparat menduga bahwa hal tersebut dilakukan oleh mahasiswa asrama. Persoalan

ini memicu amarah Ormas dan pihak aparat di Surabaya. Terdapat kurang lebih 700 orang anggota Ormas di Surabaya dengan nama FKPP (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI), Hipakad (Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat), Pemuda Pancasila, Patriot Garuda, Pagar Jati, dan FPI (Front Pembela Islam) datang di Asrama Mahasiswa. Sayangnya dalam demonstrasi tersebut para pengepung melontarkan perkataan yang tidak pantas berbau rasis terhadap mahasiswa asrama. Pihak aparat pun turut menyerang dan menembakan gas air mata sehingga tugas yang seharusnya mengamankan bertolak belakang sehingga menambah kericuhan dan menghasilkan kerusakan fasilitas asrama. Hari selanjutnya polisi memeriksa pihak Asrama Mahasiswa Papua untuk mencari tahu kronologi dari peristiwa tersebut. Namun usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil sehingga polisi melakukan tindakan penangkapan paksa terhadap 43 mahasiswa Papua dibawa ke Polrestabes Surabaya. 18 Agustus 2019 dini hari, polisi memulangkan 43 mahasiswa tersebut dan hasil proses pemeriksaan semua mahasiswa tersebut memberikan penjelasan bahwa mereka pun tidak tahu persoalan kerusakan bendera pusaka di depan asrama mereka.

Mengerahkan kekuatan dalam bentuk demonstrasi bukanlah tanpa tujuan. Dimasa sekarang semakin banyak pergerakan dari mahasiswa Papua yang studi di beberapa kota diluar Papua. Berbagai pemberitaan media menyebutkan bahwa aksi mahasiswa Papua menyuarakan tentang pelanggaran HAM dan menuntut referendum sebagai bentuk pemisahan diri dari Indonesia. Sabtu, 1 Mei 2021 Aliansi Mahasiswa Papua melakukan demonstrasi di depan Gedung Negara

Grahadi Surabaya terkait 58 tahun kembalinya Papua ke NKRI dengan beberapa tuntutan yaitu menyelesaikan persoalan sejarah Papua dan pencabutan penetapan TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris dan kemerdekaan bagi Papua. Ever Walela, Juru bicara AMP Surabaya, mengatakan :

"Kami meminta kepada Negara Republik Indonesia sekaligus rezim hari ini untuk segera mengusut dan segera menyelesaikan persoalan sejarah Papua," (<https://www.jpnn.com/news/mahasiswa-papua-gelar-aksi-di-surabaya-diadang-massa-pimpinan-stanley-panas> diakses pada Desember 2021).

Saat orasi pimpinan AMP berjalan, tiba-tiba massa lain yang bertentangan dengan aspirasi menghadang AMP. Massa tersebut mengatasnamakan kelompok mereka sebagai kaum Melanesia. Dalam proses demonstrasi kedua kelompok ini sempat saling adu mulut dan saling dorong. Polisi yang berjaga langsung bertindak untuk membubarkan dua kelompok tersebut. Stanley Latul, korlap aksi Melanesia itu berterus terang bahwa ia tidak setuju terhadap tuntutan yang diutarakan oleh AMP yaitu memisahkan diri dari Indonesia. Sebagai sesama kelompok Melanesia aksi penghalangan tersebut merupakan inisiatif dalam mengingatkan para mahasiswa penuntut untuk dapat saling menjaga keutuhan NKRI.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, aktualisasi kesadaran bela negara saat ini kenyataannya masih rendah pada akhirnya dapat mempengaruhi sikap nasionalisme dan lemahnya pertahanan negara sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Aktualisasi Nilai Bela Negara Bagi Mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana aktualisasi nilai bela negara oleh mahasiswa papua di Asrama Mahasiswa Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui aktualisasi nilai bela negara oleh mahasiswa papua di Asrama Mahasiswa Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana aktualisasi nilai bela negara bagi mahasiswa papua di Surabaya dan juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan selama di bangku perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik dan mempertajam pengetahuan mengenai Aktualisasi Bela Negara Bagi Mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dapat menambah referensi sebagai bahan penunjang pendidikan dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media pembandingan bagi peneliti lainnya serta sebagai acuan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Instansi/Pihak Lainnya

Sebagai bahan informasi khususnya mengenai pentingnya kekuatan bela negara bagi generasi muda sebagai penerus bangsa.